



Analisis Program Kebijakan Pemerintah Desa Pocangan Berbasis Pemberdayaan

Iwan Ahmad Puji Santoso*

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jember,

DOI:

<https://doi.org/10.47134/par.v3i2.5700>

*Correspondence: Iwan Ahmad Puji Santoso

Email: iwansantoso209@email.com

Received: 07-12-2025

Accepted: 19-01-2026

Published: 28-02-2026



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pemerintah desa berbasis pemberdayaan masyarakat di Desa Pocangan, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui teknik wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi yang dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña serta triangulasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pemberdayaan masyarakat telah memberikan manfaat nyata dalam sektor infrastruktur, pertanian, kesehatan, dan sosial, namun implementasinya belum optimal. Berdasarkan teori evaluasi kebijakan William N. Dunn, program tergolong cukup efektif tetapi masih lemah pada aspek pemerataan dan kecukupan, sedangkan menurut Jim Ife, pemberdayaan masih berada pada tahap enabling dan belum mencapai empowering. Kendala utama meliputi rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan kapasitas aparatur desa, kurangnya pendampingan program, serta persepsi masyarakat yang masih memandang program sebagai bantuan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas, partisipasi, dan orientasi keberlanjutan program.

Kata kunci: Pemberdayaan Masyarakat, Kebijakan Desa, Evaluasi Kebijakan,

Partisipasi Masyarakat

Abstract: This study aims to analyze the implementation of village government policies based on community empowerment in Pocangan Village, Sukowono District, Jember Regency using a descriptive qualitative approach through in-depth interviews, observation, and documentation, analyzed with the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña and data triangulation. The results show that community empowerment programs have provided tangible benefits in infrastructure, agriculture, health, and social sectors, yet their implementation remains suboptimal. Based on the policy evaluation theory of William N. Dunn, the programs are considered fairly effective but still weak in terms of equity and adequacy, while according to Jim Ife, empowerment is still at the enabling stage and has not reached empowering. Major obstacles include low community participation, limited capacity of village officials, lack of program assistance, and public perceptions that view the programs merely as aid. Therefore, improvements in capacity, participation, and sustainability-oriented development are required.

Keywords: Community Empowerment, Village Policy, Policy Evaluation, Community Participation

Pendahuluan

Pembangunan desa merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan nasional Indonesia yang memiliki peran strategis dalam mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat (Salahudin, 2022). Dalam paradigma pembangunan modern, desa tidak lagi diposisikan sebagai objek pembangunan yang hanya menerima kebijakan dari pemerintah pusat, melainkan sebagai subjek yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola sumber daya serta potensi wilayahnya secara mandiri (Salman et al., n.d.).

Transformasi paradigma ini secara normatif ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan ruang otonomi luas bagi desa untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan berbasis kebutuhan lokal masyarakat.

Dalam kerangka tersebut, pendekatan pemberdayaan masyarakat menjadi strategi utama dalam mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan, partisipatif, dan berkeadilan (Heri, 2024). Pemberdayaan masyarakat tidak hanya dimaknai sebagai pemberian bantuan atau fasilitas, tetapi sebagai proses yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, kemandirian, serta kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya yang dimiliki (Sitimulyo et al., n.d.). Dengan demikian, masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga menjadi aktor utama yang berperan aktif dalam setiap tahapan pembangunan desa.

Secara konseptual, pemberdayaan masyarakat menekankan pentingnya partisipasi, kemandirian, dan kontrol masyarakat terhadap proses pembangunan (Firman, 2021). Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa pembangunan yang berkelanjutan hanya dapat tercapai apabila masyarakat memiliki kemampuan untuk mengelola dan implementasi mengembangkan potensi yang dimiliki secara mandiri (Akbar et al., 2023). Namun demikian, dalam praktiknya, implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat di berbagai desa di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, baik dari aspek struktural maupun kultural.

Dari aspek struktural, keterbatasan kapasitas aparatur desa dalam merancang dan melaksanakan program pemberdayaan menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan (Zakirin & Arifin, 2022). Aparatur desa sering kali masih menghadapi kendala dalam hal perencanaan program, pengelolaan anggaran, serta pendampingan masyarakat. Selain itu, koordinasi antar lembaga desa juga belum berjalan secara optimal, sehingga pelaksanaan program pemberdayaan tidak terintegrasi dengan baik (Anisa et al., 2024a).

Sementara itu, dari aspek kultural, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat menjadi tantangan yang tidak kalah penting. Dalam banyak kasus, masyarakat masih cenderung bersifat pasif dan belum sepenuhnya terlibat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan (Dai & Kurniansah, 2025). Kondisi ini tidak terlepas dari budaya ketergantungan yang masih kuat, di mana masyarakat lebih terbiasa menjadi penerima bantuan daripada sebagai subjek pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga menyangkut perubahan pola pikir dan budaya masyarakat (Ras, 2013).

Fenomena tersebut juga terlihat di Desa Pocangan, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember. Desa ini memiliki potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang cukup besar untuk dikembangkan dalam mendukung pembangunan desa. Pemerintah desa telah melaksanakan berbagai program pemberdayaan masyarakat, mulai dari sektor pertanian, pembangunan infrastruktur, hingga kegiatan sosial kemasyarakatan. Program-program tersebut secara normatif dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi awal dan temuan penelitian dalam proposal skripsi, implementasi program pemberdayaan masyarakat di Desa Pocangan belum sepenuhnya optimal. Hal ini ditunjukkan oleh masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam program, terbatasnya kapasitas aparatur desa dalam melakukan pendampingan, serta belum meratanya pemahaman masyarakat terhadap tujuan program pemberdayaan (Lumbantobing, 2022).

Selain itu, terdapat kecenderungan bahwa masyarakat masih memandang program pemberdayaan sebagai bentuk bantuan semata, bukan sebagai proses peningkatan kapasitas. Persepsi ini menyebabkan masyarakat kurang memiliki rasa memiliki (sense of ownership) terhadap program yang dilaksanakan. Akibatnya, keberlanjutan program menjadi terganggu karena masyarakat tidak sepenuhnya terlibat dalam pengelolaan program tersebut.

Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program juga masih belum merata (Nisa & Salomo, 2019). Sebagian besar masyarakat hanya terlibat pada tahap pelaksanaan, sementara dalam tahap perencanaan dan pengambilan keputusan masih didominasi oleh aparat desa. Kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip partisipasi yang menjadi dasar pemberdayaan masyarakat belum sepenuhnya terwujud dalam praktik.

Lebih lanjut, penelitian ini juga menemukan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan dengan realitas implementasi di lapangan. Program yang dirancang untuk meningkatkan kemandirian masyarakat justru dalam beberapa kasus belum mampu mengubah pola ketergantungan masyarakat terhadap bantuan pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pemberdayaan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh keberadaan program, tetapi juga oleh bagaimana program tersebut diimplementasikan dan diterima oleh masyarakat (Sutanto, 2017).

Dalam konteks ini, evaluasi kebijakan menjadi penting untuk dilakukan guna menilai sejauh mana program pemberdayaan masyarakat telah berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Evaluasi tidak hanya berfungsi untuk mengukur keberhasilan program, tetapi juga untuk mengidentifikasi kelemahan serta memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan di masa mendatang. Tanpa adanya evaluasi yang komprehensif, program pemberdayaan berpotensi berjalan tanpa arah yang jelas dan tidak memberikan dampak signifikan bagi masyarakat.

Selain itu, penting untuk memahami bahwa pemberdayaan masyarakat bukan hanya persoalan teknis pelaksanaan program, tetapi juga merupakan proses sosial yang melibatkan interaksi antara pemerintah desa dan masyarakat (Masyarakat et al., n.d.). Oleh karena itu, pendekatan kualitatif menjadi relevan untuk digunakan dalam penelitian ini, karena mampu menggali pengalaman, persepsi, dan dinamika sosial yang terjadi dalam implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis secara mendalam bagaimana implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat di Desa Pocangan. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menilai keberhasilan program, tetapi juga untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi

pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan pemberdayaan masyarakat yang lebih efektif, partisipatif, dan berkelanjutan.

Penelitian ini menggunakan teori evaluasi kebijakan dari William N. Dunn sebagai kerangka utama dalam menganalisis implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat (Dunn, 1999). Dunn menyatakan bahwa evaluasi kebijakan merupakan proses sistematis yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu kebijakan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Evaluasi kebijakan dilakukan melalui enam indikator utama, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan.

Efektivitas mengukur sejauh mana program mampu mencapai tujuan yang telah direncanakan, sedangkan efisiensi menilai hubungan antara sumber daya yang digunakan dengan hasil yang diperoleh. Kecukupan berkaitan dengan kemampuan program dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat, sementara pemerataan menilai distribusi manfaat program secara adil. Responsivitas mengukur kemampuan pemerintah dalam merespons kebutuhan masyarakat, dan ketepatan menilai kesesuaian program dengan konteks permasalahan yang dihadapi (Aritonang & Trimurni, 2024).

Selain teori evaluasi kebijakan, penelitian ini juga menggunakan teori pemberdayaan masyarakat dari Jim Ife yang menekankan bahwa pemberdayaan merupakan proses yang melibatkan tiga dimensi utama, yaitu *enabling*, *empowering*, dan *protecting* (Ife, 2013). Dimensi *enabling* berkaitan dengan penciptaan kondisi yang memungkinkan masyarakat berkembang, *empowering* berfokus pada penguatan kapasitas dan partisipasi masyarakat, sedangkan *protecting* menekankan perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang rentan.

Dalam konteks implementasi kebijakan desa, kedua teori tersebut saling melengkapi. Teori Dunn memberikan kerangka evaluatif untuk menilai keberhasilan kebijakan, sementara teori Ife memberikan perspektif mengenai bagaimana pemberdayaan seharusnya dilakukan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menilai keberhasilan program secara teknis, tetapi juga melihat sejauh mana program tersebut mampu meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa masih menghadapi berbagai kendala (Kaseng, 2023). Permasalahan yang sering muncul antara lain rendahnya partisipasi masyarakat, dominasi pembangunan fisik, serta lemahnya kapasitas aparatur desa. Selain itu, kurangnya pendampingan dan evaluasi program juga menjadi faktor yang mempengaruhi keberhasilan pemberdayaan masyarakat.

Namun, penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat dapat berhasil apabila dilakukan dengan pendekatan berbasis potensi lokal, penguatan kelembagaan masyarakat, serta pelibatan masyarakat secara aktif dalam setiap tahapan pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pemberdayaan tidak hanya ditentukan oleh program yang dilaksanakan, tetapi juga oleh proses implementasi dan keterlibatan masyarakat.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki relevansi yang kuat dalam mengkaji implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam konteks desa. Penelitian ini juga memiliki kontribusi dalam memperkaya kajian kebijakan publik, terutama dalam memahami dinamika implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat di tingkat lokal.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat di Desa Pocangan, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggambarkan realitas sosial secara holistik serta memberikan ruang bagi peneliti untuk mengeksplorasi makna, pengalaman, dan persepsi para informan terkait pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Dalam konteks penelitian kebijakan publik, pendekatan ini dinilai relevan karena tidak hanya menilai hasil kebijakan secara kuantitatif, tetapi juga mampu mengungkap dinamika sosial, interaksi antar aktor, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan di tingkat lokal.

Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yaitu penelitian yang berfokus pada upaya menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fenomena yang diteliti. Melalui desain ini, peneliti berupaya memberikan gambaran komprehensif mengenai bagaimana kebijakan pemberdayaan masyarakat dijalankan, bagaimana masyarakat merespons program tersebut, serta apa saja faktor pendukung dan penghambat yang muncul dalam proses implementasi kebijakan.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Pocangan, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember pada tahun 2025. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa desa tersebut memiliki berbagai program pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan, namun berdasarkan observasi awal menunjukkan adanya permasalahan dalam implementasi kebijakan. Dengan demikian, Desa Pocangan dipandang sebagai lokasi yang relevan untuk mengkaji secara mendalam dinamika implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa.

Subjek penelitian dalam pendekatan kualitatif disebut sebagai informan, yaitu individu yang dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, serta keterlibatan langsung dalam program pemberdayaan masyarakat. Pemilihan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik penentuan informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Kriteria tersebut meliputi keterlibatan dalam pelaksanaan program, pemahaman terhadap kebijakan desa, serta pengalaman langsung dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Informan dalam penelitian ini terdiri dari berbagai unsur yang memiliki peran strategis dalam implementasi kebijakan, antara lain aparatur pemerintah desa, tokoh masyarakat, serta warga yang terlibat dalam program pemberdayaan. Aparatur desa dipilih karena memiliki peran dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, tokoh masyarakat dipilih karena memiliki pengaruh dalam kehidupan sosial masyarakat, sedangkan warga

dipilih sebagai penerima manfaat program yang dapat memberikan perspektif mengenai dampak kebijakan yang dirasakan secara langsung.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga metode utama, yaitu wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi, dan dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan untuk menggali informasi secara lebih detail mengenai pengalaman, persepsi, serta pandangan informan terhadap implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat. Proses wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar peneliti tetap memiliki pedoman pertanyaan, namun tetap memberikan kebebasan kepada informan untuk menyampaikan informasi secara luas dan mendalam.

Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai kondisi lapangan serta pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Melalui observasi, peneliti dapat melihat secara langsung interaksi antara pemerintah desa dan masyarakat, serta bagaimana program dijalankan dalam praktik. Observasi ini juga membantu peneliti dalam memahami konteks sosial yang tidak selalu dapat diungkap melalui wawancara.

Sementara itu, dokumentasi digunakan sebagai data pendukung untuk melengkapi informasi yang diperoleh dari wawancara dan observasi. Dokumen yang digunakan meliputi dokumen resmi desa seperti APBDes, RKPDDes, laporan kegiatan, serta arsip lainnya yang berkaitan dengan program pemberdayaan masyarakat. Penggunaan data dokumentasi bertujuan untuk memperkuat validitas data serta memberikan gambaran yang lebih objektif mengenai implementasi kebijakan.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif yang dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña, yang terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kondensasi data dilakukan dengan cara memilih, menyederhanakan, serta memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian (Miles et al., 2014). Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif agar memudahkan peneliti dalam memahami pola dan hubungan antar data. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan melalui proses interpretasi data secara berulang untuk menghasilkan temuan penelitian yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yaitu dengan membandingkan data dari berbagai sumber, metode, dan waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan triangulasi waktu dilakukan dengan mengumpulkan data pada waktu yang berbeda untuk memastikan konsistensi informasi.

Selain itu, peneliti juga melakukan proses verifikasi data secara terus-menerus selama penelitian berlangsung untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar mencerminkan kondisi yang terjadi di lapangan. Dengan demikian, melalui pendekatan metodologis ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat di Desa Pocangan, serta mengungkap berbagai dinamika yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan tersebut.

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat di Desa Pocangan telah berjalan dalam berbagai sektor, seperti pembangunan infrastruktur desa, peningkatan kapasitas pertanian, program kesehatan masyarakat, serta kegiatan sosial kemasyarakatan. Secara umum, program-program tersebut telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan akses terhadap fasilitas dasar dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat desa. Namun demikian, jika dianalisis secara lebih mendalam, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai keterbatasan yang mempengaruhi tingkat keberhasilannya.

Efektivitas Program dalam Perspektif Empiris

Dari aspek efektivitas, program pemberdayaan masyarakat di Desa Pocangan dapat dikatakan telah mencapai sebagian tujuan yang ditetapkan. Program seperti pengadaan alat pertanian, pembangunan jalan desa, pengadaan lampu jalan, serta kegiatan sosial seperti bantuan alat sekolah dan pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil memberikan dampak positif terhadap kehidupan masyarakat (Anisa et al., 2024b). Hal ini sejalan dengan temuan penelitian yang menunjukkan bahwa program-program tersebut mampu membantu masyarakat dalam meningkatkan produktivitas serta memperbaiki kondisi lingkungan sosial.

Namun, efektivitas program belum sepenuhnya optimal. Hal ini disebabkan oleh masih adanya kelompok masyarakat yang belum terlibat secara aktif dalam program pemberdayaan. Sebagian masyarakat hanya berperan sebagai penerima manfaat tanpa terlibat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan program masih bersifat parsial dan belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat secara merata.

Jika dianalisis menggunakan teori William N. Dunn, efektivitas kebijakan di Desa Pocangan berada pada kategori "cukup berhasil", namun belum mencapai tingkat optimal karena belum mampu menghasilkan perubahan yang signifikan dalam peningkatan kemandirian masyarakat.

Efisiensi Program: Antara Pengelolaan Anggaran dan Kapasitas SDM

Dari aspek efisiensi, pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di Desa Pocangan menunjukkan kinerja yang cukup baik dalam pemanfaatan anggaran. Pemerintah desa telah berupaya mengalokasikan dana sesuai dengan kebutuhan program yang direncanakan (Setiawan, 2025). Hal ini terlihat dari berbagai program yang dapat direalisasikan dengan sumber daya yang tersedia.

Namun demikian, efisiensi program tidak hanya ditentukan oleh aspek finansial, tetapi juga oleh kapasitas sumber daya manusia. Berdasarkan hasil penelitian, keterbatasan kapasitas aparatur desa dalam hal teknis pelaksanaan dan pendampingan masyarakat menjadi salah satu faktor yang menghambat efisiensi program. Selain itu, kendala teknis di lapangan, seperti koordinasi yang belum optimal serta keterbatasan waktu pelaksanaan, juga mempengaruhi tingkat efisiensi program.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa efisiensi program di Desa Pocangan masih bersifat relatif, di mana secara anggaran sudah cukup baik, tetapi secara implementasi masih memerlukan peningkatan kapasitas kelembagaan.

Kecukupan Program: Antara Pemenuhan Kebutuhan dan Solusi Jangka Panjang

Dari aspek kecukupan, program pemberdayaan masyarakat dinilai telah mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, terutama dalam sektor pertanian, kesehatan, dan pendidikan. Program-program yang dilaksanakan mampu memberikan solusi jangka pendek terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Program tersebut belum sepenuhnya mampu menyelesaikan permasalahan secara menyeluruh. Permasalahan seperti rendahnya tingkat pendapatan masyarakat, keterbatasan akses ekonomi, serta rendahnya kapasitas masyarakat masih belum teratasi secara optimal. Hal ini menunjukkan bahwa program pemberdayaan yang dilaksanakan masih bersifat jangka pendek dan belum sepenuhnya berorientasi pada keberlanjutan.

Dalam perspektif teori William N. Dunn, kecukupan program di Desa Pocangan dapat dikategorikan belum optimal karena belum mampu memberikan solusi yang menyeluruh terhadap permasalahan masyarakat.

Pemerataan Program: Masalah Klasik Implementasi Kebijakan Desa

Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah masih adanya ketimpangan dalam distribusi manfaat program pemberdayaan masyarakat (Salahudin, 2022). Tidak semua masyarakat mendapatkan manfaat yang sama dari program yang dilaksanakan. Kelompok masyarakat yang aktif dalam kegiatan desa cenderung lebih banyak mendapatkan manfaat dibandingkan dengan kelompok masyarakat yang kurang aktif.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian dalam skripsi yang menunjukkan bahwa pemerataan program masih menjadi tantangan utama dalam implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme distribusi program belum sepenuhnya mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara adil (Mangkarto, 2016).

Dalam perspektif evaluasi kebijakan, aspek pemerataan menjadi indikator penting yang menentukan keberhasilan kebijakan dalam menciptakan keadilan sosial. Oleh karena itu, permasalahan pemerataan ini perlu menjadi perhatian utama dalam perbaikan kebijakan di masa mendatang.

Responsivitas Pemerintah Desa: Antara Partisipasi Formal dan Substantif

Pemerintah Desa Pocangan menunjukkan tingkat responsivitas yang cukup baik terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini terlihat dari adanya pelibatan masyarakat dalam musyawarah desa serta upaya pemerintah desa dalam menyesuaikan program dengan kebutuhan masyarakat.

Namun demikian, jika dianalisis lebih dalam, partisipasi masyarakat yang terjadi masih bersifat formal dan belum sepenuhnya substantif. Masyarakat memang dilibatkan dalam forum musyawarah, tetapi keterlibatan tersebut belum sepenuhnya memberikan ruang bagi masyarakat untuk berperan dalam pengambilan keputusan (fanila, n.d.).

Kondisi ini menunjukkan bahwa responsivitas pemerintah desa masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal memberikan ruang partisipasi yang lebih luas dan bermakna bagi masyarakat.

Ketepatan Program: Kesesuaian dengan Kebutuhan Lokal

Dari aspek ketepatan, program pemberdayaan yang dilaksanakan di Desa Pocangan dinilai telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Program yang dilaksanakan mencakup berbagai sektor yang relevan dengan kondisi masyarakat, seperti pertanian, pendidikan, dan kesehatan.

Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa telah mampu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dengan cukup baik. Namun demikian, ketepatan program tidak selalu diikuti oleh keberhasilan implementasi, karena masih terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaan program.

Analisis Pemberdayaan: Perspektif Jim Ife

Jika dianalisis menggunakan teori pemberdayaan masyarakat dari Jim Ife, implementasi program di Desa Pocangan masih berada pada tahap enabling. Pemerintah desa telah berupaya menyediakan fasilitas dan peluang bagi masyarakat untuk berkembang, namun belum sepenuhnya mampu mendorong masyarakat untuk mandiri. Dimensi empowering yang menekankan pada penguatan kapasitas dan kontrol masyarakat belum sepenuhnya tercapai. Hal ini terlihat dari masih terbatasnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan serta rendahnya tingkat kemandirian masyarakat dalam mengelola program.

Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa faktor utama yang menghambat implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat di Desa Pocangan, yaitu:

1. Rendahnya partisipasi masyarakat
2. Keterbatasan kapasitas aparatur desa
3. Kurangnya pendampingan program
4. Persepsi masyarakat sebagai penerima bantuan
5. Minimnya keberlanjutan program

Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa permasalahan implementasi kebijakan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berkaitan dengan aspek sosial dan budaya masyarakat.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat di Desa Pocangan menunjukkan capaian yang cukup baik dalam memberikan manfaat nyata, khususnya pada sektor infrastruktur, pertanian, kesehatan, dan sosial. Namun demikian, temuan penelitian mengungkap bahwa keberhasilan tersebut masih bersifat parsial dan belum sepenuhnya mampu mendorong kemandirian masyarakat. Dalam perspektif evaluasi kebijakan William N. Dunn, kebijakan tergolong cukup efektif, tetapi belum

optimal terutama pada aspek pemerataan dan kecukupan. Sementara itu, dalam perspektif pemberdayaan Jim Ite, program masih berada pada tahap enabling dan belum mencapai empowering, yang berarti masyarakat belum sepenuhnya memiliki kapasitas dan kontrol terhadap pembangunan.

Implikasi penting dari temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan program pemberdayaan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan program, tetapi sangat bergantung pada kualitas partisipasi masyarakat, kapasitas aparatur desa, serta perubahan paradigma dari bantuan menuju kemandirian. Rendahnya partisipasi dan masih kuatnya persepsi masyarakat sebagai penerima bantuan berpotensi menghambat keberlanjutan program, sehingga tanpa perbaikan mendasar, program pemberdayaan berisiko hanya menjadi kegiatan administratif yang kurang berdampak jangka panjang.

Secara praktis, pemerintah desa perlu melakukan beberapa langkah strategis, antara lain:

1. meningkatkan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan teknis dan manajerial,
2. memperkuat partisipasi masyarakat secara substantif sejak tahap perencanaan hingga evaluasi,
3. mengembangkan program berbasis potensi lokal yang berorientasi pada kemandirian ekonomi masyarakat, serta
4. memperkuat sistem pendampingan dan monitoring agar program berjalan berkelanjutan dan tepat sasaran.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar dilakukan studi dengan pendekatan kuantitatif atau mixed methods guna mengukur secara lebih terukur dampak pemberdayaan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, penelitian komparatif antar desa juga penting dilakukan untuk mengidentifikasi praktik terbaik (best practices) dalam implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat, sehingga dapat menjadi rujukan dalam perumusan kebijakan yang lebih efektif, partisipatif, dan berkelanjutan.

Referensi

_4.+Jurnal+Peran+Partisipasi+Masyarakat+fanila. (n.d.).

Akbar, R. A., Fauzan, M., Arsyad, A. A. J., Barki, K., & Alamsyah. (2023). Implementasi Pendekatan Community Empowerment Untuk Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Melalui Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah. *Journal of Scientech Research and Development*, 5(1), 65–76. <https://doi.org/10.56670/jsrd.v5i1.95>

Anisa, B. M. N., Noor, I., & Nugroho, G. W. (2024a). Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Jampangkulon. *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal*, 3(3). <https://doi.org/10.56672/syirkah.v3i3.327>

Anisa, B. M. N., Noor, I., & Nugroho, G. W. (2024b). Efektivitas pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Jampangkulon. *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal*, 3(3), 1665–1687.

Aritonang, P. A. R., & Trimurni, F. (2024). Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penyediaan Data Peserta Program Keluarga

- Harapan di Kelurahan Kampung Seraya Kota Batam. *Jurnal Penelitian Inovatif*, 4(3), 1399–1410. <https://doi.org/10.54082/jupin.556>
- Dai, S. L., & Kurniansah, R. (2025). Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata: Studi Kasus Desa Bayan, Kabupaten Lombok Utara. *Jurnal Ilmiah Hospitality*, 14(1), 597–606. <https://doi.org/10.47492/jih.v14i1.3845>
- Dunn, W. N. (1999). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gadjah Mada University Press.
- Firman, A. A. (2021). Pemberdayaan Masyarakat di Desa Berbasis Komunitas: Review Literatur. *Jurnal Ilmiah Tata Sejuta STIA Mataram*, 7(1), 132–146. <https://doi.org/10.32666/tatasejuta.v7i1.196>
- Heri, A. (2024). Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 4(3), 1376–1388.
- Ife, J. (2013). *Community Development in an Uncertain World: Vision, Analysis and Practice*. Cambridge University Press.
- Kaseng, E. S. (2023). Analisis pendekatan komunikasi partisipatif lembaga desa dalam pemberdayaan masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Ekonomi Dan Riset Pembangunan*, 1(3), 42–52.
- Lumbantobing, A. (2022). Pengaruh Pendampingan Dan Motivasi Aparatur Desa Terhadap Efektifitas Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Fakir Miskin Di Desa Sei Mencirim Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik*, 2(1), 1–10. <https://doi.org/10.51622/jjspol.v2i1.732>
- Mangkarto, M. (2016). Sertifikat halal dan pengaruhnya terhadap Kepercayaan Konsumen pada Restoran (Studi Kasus Restoran Kentucky Fried Chicken Cabang Manado). *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 3(2). <https://doi.org/10.30984/as.v3i2.339>
- Masyarakat, P., Kegiatan, D., Masyarakat, P., & Desa, D. I. (n.d.). 72 Dwi Iriani Margayaningsih, *P eran Masyarakat Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa*.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3, Ed.). SAGE Publications.
- Nisa, N. K., & Salomo, R. V. (2019). Keterlibatan Masyarakat dalam Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa Pabedilankulon Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.26740/jpsi.v4n1.p1-7>
- Ras, A. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan*.
- Salahudin, S. (2022). Pengembangan dan Percepatan Pencapaian Tujuan Pemerataan Pembangunan Desa. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 3(2), 674–695.
- Setiawan, D. (2025). *Evaluasi Kebijakan Dana Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat di Desa Bangun Rejo*.
- Sitimulyo, D., Piyungan, K., Bantul dalam Pembentukan Kelompok Pengelola Sampah Mandiri Ambar Teguh Sulistiyani, K., Wulandari, Y., Jurusan Manajemen dan Kebijakan Publik, D., Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, F., Gadjah Mada, U., & Jurusan Manajemen dan Kebijakan Publik, M. (n.d.). *Proses Pemberdayaan Masyarakat*.

-
- Sutanto, S. H. (2017). Implementasi Program Pendamping Profesional Desa : Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3md) Di Kabupaten Bojonegoro. *Cakrawala*, 11(1), 49–66. <https://doi.org/10.32781/cakrawala.v11i1.5>
- Tata Kelola Menuju Desa Mandiri Salman, F., Mursak, M., & Zulkifli Arifin, Ms. (n.d.). *ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA*.
- Zakirin, M., & Arifin, J. (2022). Evaluasi kebijakan dilihat dari aspek dampak program keluarga harapan (PKH) di Desa Hayaping Kecamatan Awang Kabupaten Barito Timur. *JAPB*, 5(1), 256–271.